

Protes Sang Patih Demi Hutan Adat

Sesepuh adat suku Talang Mamak mengembalikan Kalpataru, simbol pelestari hutan, kepada pemerintah. Sebagai bentuk protes lantaran hutan adat suku mereka habis diserobot warga pendatang dan perusahaan.

Pria renta itu memendam amarah. Di bawah temaram lampu minyak, sesepuh adat suku Talang Mamak itu bercerita, nasib hutan adat yang mereka diami kini luluh lantak diserobot warga pendatang dan perusahaan. "Saya sakit hati. Rimba pusaka kami sudah habis. Entah bagaimana nasib kami ke depan," ujarnya dengan mimik sedih.

Kegusaran Patih Laman, pria berusia 90 tahun, itu sudah berlangsung lama. Penghargaan Kalpataru sebagai pendekar lingkungan yang diserahkan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2003 justru membuat Laman menderita.

Kalpataru hanya membuat Laman bangga sesaat. Tapi kemudian ia menjadi gundah gulana, hingga jatuh sakit. "Untuk apa saya pegang piala ini kalau hutan adat yang menjadi sumber penghidupan suku kami terus dibabat tanpa ada perlindungan dari pemerintah. Padahal, hutan adat kami telah ditetapkan menjadi kawasan

yang dilindungi," katanya.

Pada saat ditemui GATRA, awal Februari lalu, Patih Laman hanya bertelanjang dada dan mengenakan sehelai kain penutup kepala. Ia ditemani anak angkatnya, Ameng. Sejak istrinya meninggal, enam tahun lalu, kini Laman hidup ditemani dua cucunya, Locok dan Hokoman.

Patih Laman mengisahkan, perasaan tak enak memegang Kalpataru membulatkan tekadnya untuk mengembalikan penghargaan bergengsi itu kepada pemerintah. Ia berangkat dari rumahnya di Desa Sei Ekok, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, menuju Pekanbaru, awal bulan lalu. Laman tak punya uang untuk menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Akhirnya ia menemui Gubernur Riau, Rusli Zainal, untuk mengembalikan Kalpataru itu.

Namun sang gubernur tak ada di tempat lantaran sedang mengikuti rapat



Patih Laman

koordinasi gubernur se-Indonesia di Bogor bersama Presiden SBY. Laman pun kembali pulang dengan tetap menggenggam piala Kalpataru yang membuat hatinya bak dicocok sembilu.

Patih Laman memang pantas kecewa terhadap pemerintah. Sebab kawasan hutan adat suku Talang Mamak yang berada di dalam Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) Riau dan Jambi seluas 1.800 hektare, antara lain terdapat di Penguatan Penyabungan dan 150 hektare di hutan Durian Cacar, kini sangat memprihatinkan. Sebagian besar telah berubah wujud menjadi hamparan perkebunan sawit.

Secara keseluruhan, suku Talang Mamak tersebar di 10 desa: Desa Sei Ekok, Durian Cacar, Perigi, Gedabu, Parit, Sukamaju, Sei Limau, Pring Jaya, Tujuh Buah Tangga, dan Jerinjing. Hanya Desa Jerinjing yang berada di Kecamatan Rengat Barat. Selebihnya berada di Kecamatan Rakit Kulim.

Pada saat ini, selain hutan adat di Penguatan Penyabungan, hutan adat di Sungai Tunu seluas 104.933 hektare juga porak-poranda "dilahap" pendatang dan perusahaan perkebunan sejak 2008. Hutan adat Penguatan Penyabungan yang berada di Sei Ekok hanya tersisa 4 hektare. Sedangkan hutan adat Sungai Tunu yang berada di Desa Durian



Kawasan hutan adat suku Talang Mamak di Taman Nasional Bukit Tigapuluh Riau dan Jambi

Cacar habis diserobot PT Selantai Agro Lestari --perusahaan perkebunan-- yang menggarap lahan di luar izin.

Praktis, kini tinggal dua hutan adat tempat bermukim suku Melayu tua itu yang tersisa, yakni hutan Kelumbuk Tinggi Baner seluas 21.901 hektare dan hutan Durian Berjajar sekitar 98.577 hektare. Lokasinya masih berada di Desa Durian Cacar. “Mereka tidak menyerobot dua hutan adat ini karena tidak terlalu luas dan dikelilingi kebun warga setempat. Kalau itu pun “dimakan”, maka habislah hutan adat kami,” tutur Laman.

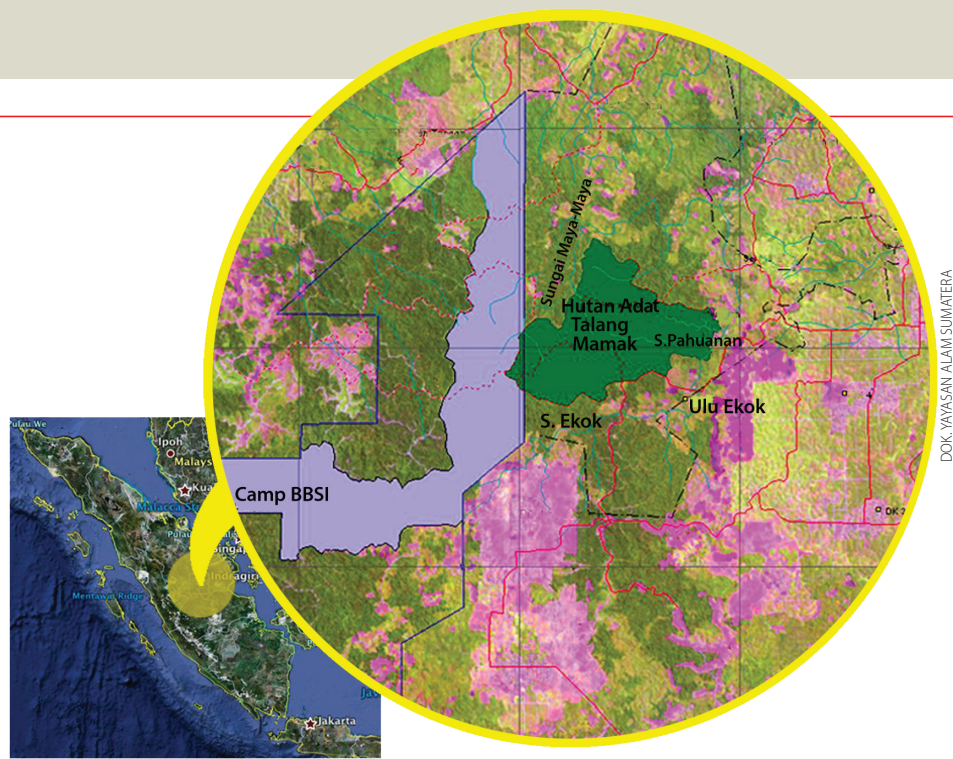
Secara sosial, suku Talang Mamak jelas dirugikan dengan penyerobotan hutan adat mereka itu. Maklum, suku ini mengambil tumbuh-tumbuhan untuk semua acara adat dari sana. Ada sialang, pasak bumi, mendarahan, garu akar, urat sembelit, kemenyan, dan lain-lain, yang selain berguna untuk obat-obatan, juga menjadi ramuan untuk acara-acara adat. Tak jarang acara adat penting digelar di hutan adat itu. “Kalau sudah jadi milik perusahaan, acara adat apa yang bisa kami laksanakan?” tuturnya.

Secara ekonomi, sumber mata pencaharian mereka pun hilang. Tumbuh-tumbuhan penting yang dapat dijual, seperti gaharu, rotan, dan jernang, juga terdapat di hutan adat itu. Sedangkan kayu meranti, kulim, dan tembesu biasanya dipakai untuk membangun rumah. Uniknya, di hutan adat itu terdapat bekas telapak kaki sepanjang satu hasta yang dikeramatkan suku Talang Mamak.

Suku Talang Mamak tak berdaya mencegah perusakan hutan di wilayahnya. Pemerintah juga terkesan tidak peduli. Menurut Laman, tindakan penyerobotan itu sebenarnya pernah dilaporkan ke Kecamatan Rakit Kulit dan Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu, tapi tak dihiraukan. Sanksi adat bagi pembabat hutan yang hanya berupa denda 4 *tabil* atau sekitar Rp 6 juta pun tak digubris. Sanksi itu hanya dihormati penduduk asli. “Warga pendatang tidak memedulikannya,” ujar Laman.

Ketika kondisi hutan adat Penguatan Penyabungan masih tersisa 25%, upaya terakhir yang dilakukan Laman adalah menetap dan membangun gubuk kecil di dalam hutan. Ia kerap mendapat ancaman, baik fisik maupun psikologis. Karena tertekan, Laman hanya bertahan dua bulan dan jatuh sakit. Pihak keluarga akhirnya menjemput dia pulang.

Laman hanya menjadi sesepuh adat sejak mengundurkan diri sebagai patih pada 1997. Kini jabatan patih dipegang cucunya, Patih Gading, yang sekaligus



DOK. YAYASAN ALAM SUMATERA

menjadi Kepala Desa Durian Cacar. Suku Talang Mamak memiliki tiga pemimpin besar: batin kuala parit di hilir, batin perigi di tengah, dan pemimpin di hulu besar, bergelar patih. Sang patih berhenti jika dipecah, meninggal dunia, atau mengundurkan diri.

Sebagai sesepuh adat, Laman berharap, pengembalian Kalpataru sebagai simbol protes sukunya itu mendapat perhatian serius dari pemerintah. “Kami minta agar hutan itu dikembalikan seperti semula, karena itu adalah sumber mata pencaharian dan tempat ritual adat,” ayah empat anak itu menegaskan.

Hutan adat suku Talang Mamak sebetulnya sudah diakui pemerintah setempat, yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 31/SKB/II/2007 dan Nomor 180/HK/II/2007, tertanggal 16 Februari 2007. Masing-masing diteken Bupati Indragiri Hulu, Thamsir Rachman, dan Ketua DPRD, H. Marpoli. Bahkan pengakuan itu diintegrasikan dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan, Darori, mengungkapkan bahwa penyerobotan hutan adat di lingkungan hutan taman nasional dilakukan oleh pengusaha. “Kalau rakyat, *nggak* mungkin,” katanya.

Terkait kasus pengembalian Kalpataru oleh suku Talang Mamak di Jambi itu, menurut Darori, perusahaan yang menggunakan hutan adat itu memiliki hak pengelolaan hutan tanaman industri. Tapi ia mengakui tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kasus ini. “Permasalahan

utamanya, ada tumpang tindih hak persoalan kelola lahan oleh oknum,” ujarnya kepada Sandika Prihatnala dari GATRA.

Dalam kasus tersebut, ada hutan kemasyarakatan yang disalahgunakan sekelompok orang. “Semacam “preman” dari unsur warga yang *nggak* mau kerja tapi mau duitnya saja,” kata Darori. Orang itu menawarkan hak pengelolaan dengan meminta imbalan. Padahal, untuk mendapatkan hak tersebut, tidak dipungut biaya sepeser pun.

Darori mengakui, masyarakat adat membutuhkan perlindungan dan bantuan pemerintah dalam pengawasan hutan. “Dalam kasus suku Talang Mamak di Jambi itu, pengawasan hutan adat oleh masyarakat sekitar justru tidak sebanding dengan ancaman yang mereka terima,” katanya. Persoalan lainnya, terkadang aparat pemerintah di tingkat bawah justru lebih pro kepada pengusaha daripada kepada masyarakat sekitar.

Keberadaan hutan adat pada dasarnya telah diakomodasi pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Dalam Pasal 1 ayat 6 undang-undang itu dijelaskan, hutan adat adalah hutan negara yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Jadi, status hutan adat adalah milik negara, tapi berada di wilayah masyarakat adat.

Terkait adanya ancaman yang diterima suku Talang Mamak dalam melindungi hutannya, menurut Darori, pemerintah akan menindak tegas pihak mana pun yang melakukan ancaman itu. “Kasihtahu *aja* ke kami, akan kami tangani,” ia menegaskan. ■

HERU PAMUJI, DAN YOGI SIRAIT (JAMBI)